



Analisis Efektivitas Program Hibah Pokmas terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Noeke Chrispur Madiarsih¹, Diah Widiawati² & Arif Dwi Hartanto³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

Article Infotion

Article history:

Received 12 January 2020;

Received in revised form 20

February 2020; Available online 29

July 2020

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) to find out how the impact of the POKMAS program on village community empowerment; and 2) to find out what are the factors that hamper the effectiveness of POKMAS in an effort to realize the empowerment of rural communities. Based on the combination of Cluster Analysis and Root Cause Anaysis methods, the POKMAS program has proven to have implications for the empowerment of rural communities as indicated through three things, namely: 1) an increase in income especially the poor; 2) the community is able to arrange village development planning and implementation; and 3) the community is able to take responsibility. However, the implementation of the program still leaves four problems, namely: 1) the limited amount of grant funds is adjusted to the needs of the village; 2) low participation of the poor and women; 3) the interests of individuals or small groups are still more dominant; and 4) limited administrative capacity. Overall, the POKMAS program has proven to have achieved village independence so it is important to hand over development to the village. This finding can be a proliferation of empowerment models that are based on the transfer of village authority.

Keywords: POKMAS Program, Village Authority, Empowerment

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana dampak program POKMAS terhadap pemberdayaan masyarakat desa; dan 2) untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat efektifitas POKMAS dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan metode kombinasi Cluster Analysis dan Root Cause Anaysis, program POKMAS terbukti mampu berimplikasi terhadap pemberdayaan masyarakat desa yang diindikasikan melalui tiga hal, yaitu: 1) adanya peningkatan pendapatan khususnya masyarakat miskin; 2) masyarakat mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan 3) masyarakat mampu melakukan pertanggungjawaban. Tetapi, pelaksanaan program masih menyisakan empat permasalahan, yaitu: 1) masih terbatasnya besaran dana hibah yang disesuaikan dengan kebutuhan desa; 2) rendahnya partisipasi masyarakat miskin dan perempuan; 3) kepentingan individu atau kelompok kecil masih lebih dominan; dan 4) keterbatasan kemampuan tertib administrasi. Secara keseluruhan, program POKMAS terbukti telah mewujudkan kemandirian desa sehingga penting untuk menyerahkan pembangunan kepada desa. Temuan ini dapat menjadi proliferasi model pemberdayaan yang berprinsip pada pelimpahan kewenangan desa.

Kata kunci: Program POKMAS, Kewenangan Desa, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Model pembangunan yang selama ini berorientasi hanya pada peningkatan pertumbuhan telah banyak menimbulkan ragam kritik. Berbagai kasus empiris membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata mempunyai problematika yang kompleks dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Hasil penelitian dari Shabnam (214) menemukan bahwa model pembangunan yang hanya

berorientasi pada pertumbuhan seringkali mengabaikan urgensi distribusi kesejahteraan, hingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, paradigma pembangunan yang dilakukan cenderung menerapkan pusat-pusat pertumbuhan yang hanya tertuju di perkotaan, hingga menyebabkan tingginya ketimpangan (Suartha et al., 214). Patil et al (2009) menyatakan bahwa

Author Correspondence:

E-mail: noeke_chrispur@unmer.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v3i2.110>

pertumbuhan ekonomi mayoritas memang berpengaruh signifikan terhadap produksi agregat, namun tidak bisa menjamin keadilan ekonomi, baik dilihat dari sisi sektoral maupun spasial. Paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan menimbulkan dua permasalahan, yaitu: 1) konsep menetes ke bawah (*Trickle-Down Effect*) yang dapat menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi sulit diwujudkan; dan 2) orientasi pertumbuhan yang hanya tertuju di kota nyatanya belum bisa menangkap karakter pembangunan yang esensinya merupakan sebuah proses pembangunan multidimensi. Dua permasalahan tersebut menimbulkan ketimpangan antara kota dan desa sulit diturunkan karena sifatnya yang bertahan dalam jangka panjang.

Terjadinya ketimpangan wilayah telah merubah pergeseran paradigma tentang pentingnya peranan desa dalam pembangunan ekonomi. Paradigma ini menginisiasi pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implikasi dari adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah setiap desa memperoleh alokasi dana dalam bentuk DAD (Dana Alokasi Desa) sebesar 10 persen dari anggaran transfer pusat ke daerah. Hal ini memberikan kewenangan bagi desa untuk merencanakan pembangunan infrastruktur agar mampu meningkatkan keberdayaan dan perekonomian masyarakat. Tujuan lainnya agar masyarakat desa mampu mandiri dan berdaya, dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Namun, pemberian kewenangan desa telah memunculkan beberapa kekhawatiran, karena (Santosa, 2014): 1) masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; 2) masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan

program yang telah direncanakan; dan 3) masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan negara, khususnya terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Hasil penelitian dari Zulfida & Fauzi (2017) mengemukakan bahwa kewenangan desa sebagai pengelola anggaran negara di level lokal telah menimbulkan dua dimensi yang kontraproduktif, yaitu: 1) kewenangan desa sebagai wujud kemandirian dan otonomi desa; dan 2) pada sisi yang lain kewenangan desa menciptakan probabilitas pelanggaran administratif dan koruptif di tingkat desa. Kekhawatiran tersebut menyebabkan paradigma pembangunan berbasis otonomi desa kurang optimal dilaksanakan. Selain itu, paradigma pembangunan yang bersifat *bottom up* kurang mampu diimplementasikan secara ideal, khususnya dari sisi perencanaan dan penganggaran pembangunan di level desa. Alasannya adalah masih belum ditemukannya model atau konstruksi yang tepat dalam pemberian kewenangan desa.

Kota Batu, Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang menerapkan pembangunan desa dengan membangun Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai entitas penerima hibah Dana Desa. Pada program POKMAS, sasarannya lebih kepada tata kelola keuangan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka pemberian kewenangan pada desa untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Batu telah melakukan upaya mekanisme pemberdayaan melalui program POKMAS yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, program ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam sebagai salah satu program pemberdayaan desa. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk penyusunan rancangan pelaksanaan pembangunan desa seperti yang diamanatkan dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan permasalahan dan studi kasus tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan penelitian, yaitu: 1) pertama untuk mengetahui dampak POKMAS terhadap pemberdayaan masyarakat desa; dan 2) kedua untuk mengetahui faktor yang menghambat efektifitas POKMAS dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua tujuan penelitian tersebut diperlukan bagi sumbangsuhnya terhadap literatur konsep pemberian kewenangan desa, dan implikasinya bagi pelaksanaan kebijakan

pengelolaan dana desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

a. Konsepsi otonomi desa

Konsep otonomi desa tidak bisa dilepaskan dari konsep otonomi daerah atau desentralisasi fiskal. Pandangan teori tradisional tentang desentralisasi fiskal (*Fiscal Federalism*) sebagaimana dijelaskan oleh Martinez-Vazquez et al. (2017) menekankan pada keuntungan alokatif untuk mendapatkan kemudahan informasi dari masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan. Pemikiran otonomi desa dilatarbelakangi oleh dua sebab, yaitu: 1) adanya *Knowledge In Society*, yaitu pemerintah desa dianggap memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi di daerahnya sehingga ritme pembangunan akan lebih baik jika diserahkan kepada pemerintahan desa; dan 2) adanya *Local Experiment*, yaitu pemerintahan desa bisa mempelajari pengalaman dari desa lain dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat mengurangi biaya kegagalan dari sebuah sistem pemerintahan yang sentralistik. Kedua keuntungan ini menyangkut pentingnya peran pemerintahan lokal (desa) dalam melakukan penyediaan barang dan jasa publik yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif melalui otonomi desa. Argumentasi tersebut diperkuat oleh Kusuma & Badrudin (2016), bahwa otonomi desa merupakan representasi dari kepercayaan amanah pusat terhadap kemampuan pemerintahan desa yang dianggap mempunyai informasi yang simetris terkait kebutuhan pembangunan masyarakat desa.

Martinez-Vazquez et al. (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi desa sangat relevan dengan prinsip otonomi daerah, yang dilakukan atas pertimbangan tiga aspek, yaitu: 1) fungsi alokasi, yaitu pemerintahan desa berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam perekonomian yang didistribusikan kepada seluruh masyarakat desa; 2) fungsi distribusi, yaitu pemerintahan desa berfungsi mendistribusikan sumber-sumber ekonomi atau pendapatan kepada seluruh masyarakat agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi lokal; dan 3) fungsi stabilisasi, yaitu pemerintahan desa diharapkan mampu menjamin dan menjaga stabilitas perekonomian lokal yang berfungsi

sebagai fondasi menjaga stabilitas ekonomi dalam level yang lebih makro. Pertimbangan tiga aspek tersebut merupakan komponen utama dari pelaksanaan otonomi daerah yang diimplementasikan dalam level desa. Tujuannya agar memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif serta menyediakan pelayanan di sektor publik secara lebih leluasa (Santosa, 2014). Hal ini diperkuat oleh pendapat Keeni et al. (2018), bahwa otonomi desa bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada warga masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Otonomi desa juga mencakup desentralisasi administratif dan substantif yang bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber-sumber finansial guna penyediaan pelayanan publik diantara berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda.

b. Konsep pemberdayaan desa

Dalam perkembangannya, pembangunan desa sebagai implementasi otonomi desa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemberdayaan desa. Menurut Pandey (2016), pemberdayaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin berbasis partisipasi, swadaya, dan kolaborasi. Pemberdayaan juga dipahami sebagai kegiatan untuk merubah masyarakat yang sebelumnya nirdaya menjadi berdaya. Dalam konteks tersebut, istilah berdaya dipahami sebagai peningkatan tawar menawar masyarakat, baik dalam pengertian peningkatan posisi tawar (*Bergaining Position*) maupun nilai tawar (*Bergaining Power*).

Beragam bukti empiris menemukan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat miskin relatif selalu berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan. Menurut Khatri (2016), pembangunan di level lokal seperti otonomi desa selalu dihubungkan dengan harapan keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (pendapatan). Kegiatan pemberdayaan diharapkan mampu mengkoneksikan sumberdaya-sumberdaya potensial sebagai input yang mampu dikonversi menjadi nominal pendapatan yang dapat diakses oleh keseluruhan masyarakat miskin.

Secara empiris, pemberdayaan masyarakat desa telah menjadi isu penting yang mempunyai relevansi kuat terhadap perubahan paradigma

pembangunan yang sebelumnya hanya tertuju pada pertumbuhan (Sonbait & Wambrau, 211). Isu ini terkait konsep alternatif dalam mengkritik model pembangunan yang bersifat pertumbuhan yang tertuju di perkotaan. Pemberdayaan desa menawarkan sebagai proses pembangunan yang mempromosikan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan keadilan sosial yang berkelanjutan baik individu maupun kelompok (Geleta et al., 217).

Sejalan dengan pendapat tersebut, terdapat beragam argumen yang menawarkan tentang proses dan komponen pemberdayaan masyarakat desa. Allahdadi (211) lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek politik. Sedangkan Cornish et al., (219) menawarkan strategi pemberdayaan lebih tertuju dalam meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat. Melalui strategi pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat. Akhter & Cheng (220) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan harus mengikuti alur inisiasi, partisipatori, dan emansipatori. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai strategi pembangunan. Strategi tersebut terkait dengan mekanisme pemberdayaan yang melalui: 1) alokasi sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan; dan 3) pengembangan sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Pemilihan teknik analisis dalam penelitian ini mengikuti kepentingan dua tujuan penelitian, yaitu pertama untuk menilai efektivitas POKMAS, dan kedua untuk menggali permasalahan POKMAS. Selain dua tujuan penelitian tersebut, penggunaan teknik analisis juga dilakukan dengan mengikuti dua jenis penggalan data, yaitu penggalan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Berdasarkan dua tujuan dan dua jenis data penelitian tersebut, maka teknik analisis dalam penelitian ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) teknik *Cluster Analysis* untuk menjawab tujuan kuantitatif atau tujuan penelitian yang pertama; dan 2) teknik analisis akar masalah atau *Root Cause Analysis* untuk menjawab tujuan kualitatif atau tujuan penelitian yang kedua.

- Pertama adalah *Cluster Analysis*, yang bertujuan untuk mengatur informasi, atau meringkas data

dengan cara mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Objek-objek tersebut dilakukan melalui kegiatan koding hasil jawaban kuesioner. Tujuan dari *Cluster Analysis* dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak program POKMAS terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Kota Batu.

- Kedua adalah *Root Cause Analysis*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama implementasi POKMAS di masyarakat. Dalam penelitian ini, metode *Root Cause Analysis* dilakukan dengan menggunakan instrumen sebab akibat yang dijelaskan melalui deskripsi, sehingga mempermudah menemukan akar masalah pelaksanaan program POKMAS. Kedua teknik analisis tersebut diharapkan mampu menyajikan hasil temuan yang mampu berkontribusi terhadap pendalaman literatur kewenangan otonomi desa dan bagi evaluasi serta pengembangan program pemberdayaan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Dampak POKMAS terhadap pemberdayaan masyarakat desa

Program POKMAS adalah salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 214 tentang Desa, yang dilaksanakan sebagai perwujudan pengaturan desa berbasis pemberdayaan dan kemandirian desa. Pengaturan desa mencakup penataan desa, yang bertujuan untuk: 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan (v) peningkatan daya saing desa. Secara substantif, pelaksanaan program POKMAS bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Program POKMAS juga dijalankan dalam rangka mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa bagi pengembangan potensi desa guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ekonomi, penilaian kesejahteraan dicerminkan melalui peningkatan penerimaan atau tingkat pendapatan yang berhasil diperoleh masing-masing rumah tangga. Pemerataan kesejahteraan sangat penting dalam memperkuat masyarakat desa sebagai objek dan subjek pembangunan, memajukan

perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Selain itu, tujuan utama program POKMAS juga mencakup peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kesuksesan ini diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan dan berdasarkan persepsi dari masyarakat selaku objek sasaran. Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, maka penilaian dampak program POKMAS terhadap pemberdayaan masyarakat desa dapat dibedakan menjadi tiga indikasi, yaitu: 1) dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa; 2) dampak terhadap kemampuan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa; dan 3) dampak terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban. Ketiga indikasi tersebut merupakan esensi dari suatu masyarakat yang dapat dikatakan berdaya.

Pertama adalah penilaian dampak program POKMAS terhadap tingkat pendapatan rumah tangga. Secara teoritis, salah satu indikasi dampak program POKMAS adalah terjadinya kenaikan tingkat kesejahteraan, yang diindikasikan dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Peningkatan pendapatan diukur dari prosentase perubahan pendapatan sebelum dan sesudah adanya program POKMAS. Berdasarkan hasil pengumpulan data berbasis kuesioner, didapatkan perubahan pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah adanya program POKMAS. Golongan rumah tangga desa dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) kelompok bawah; 2) kelompok menengah; dan 3) kelompok atas. Ketiga kelompok tersebut sama-sama kategori masyarakat desa yang relatif masih tertinggal dibandingkan masyarakat kota.

Tabel 1. Dampak Program POKMAS Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Aspek	Kelompok Bawah	Kelompok Menengah	Kelompok Atas	Rata-Rata Total Responden
Pendapatan (Rp)	1.324.389	3.528.495	6.987.345	3.946.743
Benefit yang Diterima (Rp)	789.840	1.345.900	1.345.000	1.160.246
	59,63%	38,14%	19,24%	29,39%

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 219.

Berdasarkan hasil *Cluster Analysis*, program POKMAS lebih banyak berdampak pada rumah tangga golongan bawah, yaitu sebesar 59,63 persen. Golongan rumah tangga golongan bawah adalah mereka yang dalam satu bulan hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.324.389. Rumah tangga golongan bawah mayoritas bekerja sebagai petani, pelaku UMKM, atau pekerja informal. Dengan penyelenggaraan program

POKMAS, rumah tangga golongan bawah mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 59,63 persen dari jumlah pendapatan sebelum adanya program POKMAS. Posisi kedua adalah rumah tangga golongan menengah yang mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 38,14 persen. Sedangkan rumah tangga golongan atas mendapatkan tambahan pendapatan hanya sebesar 19,24 persen. Dampak program POKMAS yang lebih signifikan terhadap kelas rumah tangga pendapatan bawah disebabkan oleh penyediaan akses infrastruktur dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh rumah tangga golongan bawah. Sementara bagi rumah tangga golongan menengah dan golongan atas, penyediaan infrastruktur dan akses pasar sudah dikuasai mengingat sebelum adanya program POKMAS, kedua kelompok tersebut sudah mempunyai aset dan jaringan bagi penyediaan sumberdaya pasar. Temuan ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa infrastruktur dasar sangat dibutuhkan kelompok rumah tangga miskin (golongan bawah).

Kedua adalah penilaian dampak program POKMAS terhadap kemampuan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Secara teoritis, kemampuan pembangunan desa yang melibatkan aparat maupun masyarakat merupakan suatu keberhasilan dalam melaksanakan otonomi desa. Dalam otonomi desa, salah satu tujuannya adalah memperkuat kapasitas masyarakat desa beserta aparat desa dalam merancang, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di tingkat desa. Tabel 2 merupakan hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan bahwa rumah tangga golongan bawah secara umum sudah dapat memahami program POKMAS dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan nilai 2,88 pada aspek sosialisasi, dimana nilai tersebut di atas rata-rata yang sebesar 2,75. Kondisi berbeda justru dialami oleh rumah tangga golongan menengah dan golongan atas yang justru nilainya di bawah rata-rata, yaitu masing-masing sebesar 2,69 dan 2,68. Hal ini mencerminkan bahwa program POKMAS mudah dipahami oleh golongan masyarakat berpendapatan bawah, khususnya dalam rangka membantu mereka dalam menyediakan akses sumberdaya ekonomi, baik infrastruktur, pasar, bahan baku, dan keterampilan.

Tabel 2. Dampak Program POKMAS Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Aspek	Kelompok Bawah	Kelompok Menengah	Kelompok Atas	Rata-Rata Total Responden
Sosialisasi	2,88	2,69	2,68	2,75
Tingkat Keaktifan	2,67	2,78	2,80	2,75

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2019.

Meski dari sisi sosialisasi golongan menengah dan golongan atas masih di bawah rata-rata, namun tingkat partisipasi mereka justru lebih tinggi (di atas rata-rata) dibandingkan rumah tangga golongan bawah. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat partisipasi rumah tangga golongan bawah kurang begitu baik jika dibandingkan rumah tangga golongan menengah dan golongan atas. Hal ini disebabkan oleh rata-rata golongan bawah yang menjadi sasaran program POKMAS, sehingga posisi mereka hanya diberikan arahan dan mengikuti instruksi pelaksanaan program POKMAS. Terlepas dari hal tersebut, kedua aspek yang dilihat dalam Tabel 2 memperlihatkan bahwa program POKMAS sudah dikatakan baik dalam aspek sosialisasi sehingga berdampak pada kemampuan masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan, namun masih sangat kurang dalam menumbuhkan/melibatkan partisipasi masyarakat miskin, termasuk golongan perempuan.

Ketiga adalah penilaian dampak program POKMAS terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban. Secara teoritis, pelaksanaan program pemberdayaan dengan berbagai bentuknya ditujukan untuk memandirikan masyarakat miskin, termasuk dalam aspek kemampuan mengevaluasi hasil program. Berbagai kasus empiris membuktikan bahwa kemampuan masyarakat desa dalam menilai hasil program menjadi indikator peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan, baik dalam bidang administratif maupun pokok-pokok materi dari program pemberdayaan. Dampak terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban dalam penelitian ini termasuk hubungannya dengan aspek monitoring program.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa rumah tangga golongan atas menganggap bahwa monitoring dalam program POKMAS masih kurang yang nilainya sebesar 2.53 atau kurang dari rata-rata sebesar 2.66. Sedangkan rumah tangga golongan

bawah dan golongan menengah menilai bahwa monitoring sudah dilaksanakan dengan baik, karena nilainya lebih dari 2.66. Kondisi ini menandakan bahwa program POKMAS dari aspek pertanggungjawaban belum tersosialisasikan dengan baik terutama bagi golongan atas. Sementara yang nilainya tinggi adalah dari golongan rumah tangga bawah, yang mencerminkan bahwa program POKMAS benar-benar mampu dipahami dan diterima oleh golongan rumah tangga berpendapatan bawah.

Tabel 3. Dampak Program POKMAS Terhadap Kemampuan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Masyarakat Desa

Aspek	Kelompok Bawah	Kelompok Menengah	Kelompok Atas	Rata-Rata Total Responden
Monitoring	2,78	2,67	2,53	2,66
Transparansi Program	2,90	2,86	2,75	2,83

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2019.

Untuk kategori transparansi program, nilai terendah atau di bawah rata-rata adalah pada golongan atas, yang menandakan bahwa transparansi program belum tersampaikan dengan baik pada rumah tangga kelompok atas. Sedangkan rumah tangga golongan bawah dan menengah menilai transparansi penggunaan dana program POKMAS sudah baik, yang ditunjukkan skornya lebih besar dari rata-rata, yakni masing-masing 2,90 dan 2,86. Kondisi ini menandakan bahwa pertanggungjawaban program POKMAS masih ditujukan hanya pada golongan masyarakat miskin dan kelas menengah, sedangkan masyarakat secara keseluruhan belum tentu tahu informasi pertanggungjawaban program. Meski demikian, program POKMAS secara keseluruhan sudah dilakukan secara transparan khususnya bagi sasaran utama program POKMAS, yaitu masyarakat miskin (golongan bawah).

Berdasarkan dampak program POKMAS berdasarkan tiga indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) program POKMAS mempunyai implikasi signifikan bagi peningkatan pendapatan, khususnya bagi golongan rumah tangga berpendapatan rendah atau rumah tangga miskin; 2) meski belum optimal, namun program POKMAS mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; dan 3) meski belum optimal, namun program POKMAS mampu meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam melakukan pertanggungjawaban program. Dari tiga indikator penilaian tersebut, dampak yang paling signifikan dari perspektif pemberdayaan adalah dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan rumah tangga kelas bawah (rumah tangga miskin).

Dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat dapat diwujudkan karena program POKMAS mampu menciptakan dua saluran manfaat. Pertama adalah penyediaan infrastruktur yang mampu menciptakan kesempatan kerja masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan seperti penyediaan jalan yang dapat membuka aksesibilitas pasar yang lebih baik, penyediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dapat menyediakan jumlah guru dan partisipasi pelaku lainnya yang lebih banyak. Temuan ini memperkuat beragam penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari Khatiri. (2016) yang menjelaskan bahwa program penyediaan infrastruktur perdesaan di India mampu menciptakan peluang usaha melalui kemudahan akses bahan baku dan akses pasar, khususnya bagi para pelaku UMKM. Cornish et al. (2019) berpendapat bahwa infrastruktur merupakan fasilitas mendasar bagi keberhasilan program pemberdayaan. Meski demikian, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh jenis infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Infrastruktur juga tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur jalan, namun juga infrastruktur komunikasi, pasar, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, dan media jaringan berbasis modal sosial. Dengan demikian, penelitian ini semakin memperkuat teori pentingnya ketersediaan infrastruktur bagi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan.

Kedua adalah peningkatan infrastruktur yang mampu berimplikasi bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat desa. Hal ini dapat dicontohkan ketika fasilitas pendidikan dan kesehatan dibangun, otomatis layanan terhadap pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat juga semakin membaik. Dalam kasus tersebut, peyediaan infrastruktur diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, produktivitas, dan daya saing. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Kusuma & Badrudin (2016), bahwa penyediaan infrastruktur dalam konteks

desentralisasi mempunyai implikasi penting sebagai sarana peningkatan kualitas keterampilan sehingga mampu meningkatkan daya saing masyarakat lokal. Penelitian sejenis juga dikemukakan Suartha et al. (2014), bahwa infrastruktur merupakan variabel penghubung antara masyarakat miskin dan peningkatan pengetahuan. Dengan peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat miskin, maka probabilitas peningkatan posisi tawar dalam konstelasi pasar juga semakin tinggi.

Hasil temuan di atas semakin menguatkan proposisi bahwa program POKMAS merupakan model pemberdayaan yang dapat merepresentasikan pentingnya kewenangan desa dalam mengelola proses pembangunannya. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sebagai aspek penengah antara keterbelakangan (nirdaya) agar menjadi lebih terbuka dan produktif (berdaya). Infrastruktur mampu menjadi media dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah (kelompok miskin). Temuan tersebut sekaligus menanggapi kritik yang selama ini mengkhawatirkan kewenangan desa. Kritik yang dibangun adalah kurang optimalnya model pemberdayaan perdesaan yang sejauh ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) pelaksanaannya kurang begitu akomodatif terhadap karakteristik lokal; dan 2) orientasi program masih tertuju pada target pembangunan. Kekhawatiran atas dua alasan ini dapat dijawab dari model POKMAS yang sejauh ini dapat: 1) mengakomodasi kepentingan lokal karena berpusat pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin sebagai target utama program; dan 2) program POKMAS tidak hanya tertuju pada target pembangunan, namun lebih kepada proses dalam mengedukasi masyarakat agar kapasitas masyarakat mampu ditingkatkan.

Selain itu, program POKMAS juga dapat menjadi cerminan urgensi penyediaan infrastruktur dasar bagi pembangunan desa yang selama ini kerap memunculkan permasalahan, diantaranya: 1) sulit menghindari *Trade-Off* antara kepentingan konservasi dan ekonomi; 2) tidak tergalinya kebutuhan masyarakat sasaran dan potensi sumberdaya lokal; dan 3) masih kedinginan terhadap kepentingan sosial dan budaya. Kritik ini memunculkan gagasan akan pentingnya konsep pengembangan masyarakat (*Community*

Development) berprinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), dimana pembangunan berkelanjutan sudah terepresentasikan dalam pelaksanaan program POKMAS.

b. Hambatan efektivitas POKMAS

Hasil analisis pelaksanaan program POKMAS mengindikasikan bahwa telah terjadi keberhasilan dalam hal pemberian kewenangan pembangunan terhadap desa. Hasil penelitian ini menguatkan argumen pentingnya memberikan kewenangan desa sebagai bentuk otonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kegiatan pemberdayaan. Penelitian ini juga menjadi penguat jawaban atas kritik yang sering diutarakan bahwa kewenangan desa seringkali menimbulkan risiko kegagalan akibat rendahnya kapasitas masyarakat maupun aparat desa dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pembangunan. Pelaksanaan program POKMAS di Kota Batu melalui penyediaan infrastruktur telah menjadi cerminan keberhasilan model pembangunan desa secara *Bottom Up* namun atas prinsip kehati-hatian, partisipatif, swadaya, dan kolaboratif sebagai syarat keberhasilan program.

Meski demikian, pelaksanaan program POKMAS masih menyisakan beberapa catatan permasalahan, sehingga belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kurang optimalnya program POKMAS tertuju pada dua indikator penilaian, yaitu: 1) dampak terhadap kemampuan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa; dan 2) dampak terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban. Sementara indikator penilaian yang optimal tertuju pada keberhasilan program POKMAS dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, sumber permasalahan program POKMAS terletak pada kurang optimalnya tata kelola kelembagaan. Tata kelola POKMAS sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) tahap inisiasi dan pengusulan; 2) tahap penganggaran dan pelaksanaan; dan 3) tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil *Root Cause Analysis*, permasalahan tata kelola program POKMAS dapat dibedakan menjadi empat aspek. Pertama, masih terbatasnya besaran dana hibah program POKMAS. Besaran dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah memang terbatas, namun berdasarkan hasil penelitian yang telah

mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan, maka besaran dana hibah merupakan pengembangan yang perlu dilakukan dalam menunjang tingkat keberhasilan dana hibah program POKMAS.

Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin dan perempuan, khususnya dalam aspek partisipasi pembuatan keputusan program. Temuan lapang menjelaskan bahwa kurang berpartisipasinya golongan masyarakat miskin dan perempuan dalam program POKMAS karena masih terdapat anggapan bahwa partisipasi masyarakat miskin dan golongan perempuan sulit untuk maju. Padahal, partisipasi masyarakat miskin dan perempuan merupakan komponen paling mendasar agar dapat mewujudkan kemandirian desa secara optimal (Geleta et al., 2017). Hasil penelitian dari Mandal (2013) mengungkapkan bahwa pemberdayaan yang gagal selama ini kurang menyediakan ruang partisipasi bagi kaum perempuan. Padahal, optimalisasi perempuan sangat diperlukan bagi peningkatan diversifikasi pendapatan rumah tangga miskin, bagi peningkatan kapasitas rumah tangga miskin secara keseluruhan, dan bagi pengkayaan gagasan berbasis gender. Temuan ini diperkuat oleh Arsal et al. (2017), bahwa peningkatan peran perempuan semakin dibutuhkan bagi peningkatan keberhasilan program pemberdayaan, mengingat optimalisasi partisipasi dapat dilakukan jika semua komponen masyarakat ikut mempunyai peran, khususnya dari kaum perempuan.

Ketiga, kepentingan individu atau kelompok kecil masih lebih dominan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan. Kenyataannya, kondisi sosial masyarakat sasaran program POKMAS sangat beragam, mulai dari wilayah yang mayoritas pribumi atau pendatang. Kondisi demikian menyebabkan banyak aspek hubungan sosial yang hingga sekarang belum bisa disentuh oleh program POKMAS, seperti dominannya elite desa, kuatnya hubungan patron-klien, dan rendahnya keberanian dan kepercayaan diri warga miskin. Temuan ini memperkaya fakta-fakta empiris bahwa program pemberdayaan ada kalanya sangat ditentukan oleh model politik lokal. Temuan dari Allahdadi (2011) menjelaskan bahwa beragam kegagalan program pemberdayaan seringkali disebabkan oleh model politik lokal bercorak patron-klien, yang menyebabkan kemiskinan desa berkarakter

kemiskinan struktural. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan model pemberdayaan berbasis pemerataan partisipasi yang diharapkan bisa mereduksi kekuatan politik lokal yang terkonsentrasi pada elite lokal yang syarat kepentingan.

Keempat, masih terbatasnya kemampuan tertib administrasi. Kondisi ini lebih kepada aspek non teknis yang terkait dengan penataan administrasi penggunaan dana hibah program POKMAS. Misalkan pada Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang masih belum dikuasai secara mendalam oleh penyelenggara program POKMAS. Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat terdapat adanya proses yang terputus karena kemampuan program POKMAS yang terbatas dalam penyusunan RAB. Hal ini lebih disebabkan masih relatif rendahnya kemampuan SDM masyarakat dalam mengelola tertib administrasi. Hasil ini memperkuat beragam penelitian yang sering menyinggung kegagalan penyelenggaraan administrasi sebagai salah satu persoalan mendasar pelaksanaan program pemberdayaan. Cornish et al. (2019) mengusulkan pentingnya pendampingan dari sisi materi dan administratif, mengingat masyarakat desa belum terbiasa dengan kegiatan administrasi yang membutuhkan pengetahuan berbasis keilmuan.

Ketiga permasalahan di atas merupakan hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan program POKMAS. Dikhawatirkan, beberapa komponen penting dari aspek pemberdayaan akan terhambat, seperti fase insisiasi, fase partisipatoris, dan fase emanisipatoris. Selain itu, ketiga permasalahan tersebut merupakan tantangan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu tata kelola (*Governance*); kapasitas lokal (*Local Capacity*); dan kearifan lokal (*Local Wisdom*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini mencakup empat hal:

- Program POKMAS di Kota Batu secara keseluruhan mempunyai dampak positif dalam membantu mengatasi permasalahan terkait dengan infrastruktur umum dan sosial; 2)
- Permasalahan dalam tata kelola POKMAS dibedakan menjadi empat aspek, yaitu: 1) keterbatasan besaran dana hibah, dikarenakan desain alokasi hibah bukan didasarkan pada

kebutuhan infrastruktur pada setiap desa, tetapi, didasarkan pada pemerataan; 2) rendahnya partisipasi masarakat miskin dan perempuan; 3) terdapat kecenderungan kepentingan individu dan elite lokal; dan 4) keterbatasan wawasan tentang pertanggung jawaban dan tertib administrasi.

- Desain program POKMAS yang tidak didasarkan kepada kebutuhan, maka perencanaan dan pelaksanaan program masih belum terfokus dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, J., & Cheng, K. (2020). Sustainable empowerment initiatives among rural women through microcredit borrowings in bangladesh. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062275>
- Allahdadi, F. (2011). Women's empowerment for rural development. *Journal of American Science*, 7(1), 40–42.
- Arsal, T., Basri, M., & Tono, S. (2017). Bakul: Contribution of Rural Women to Family Economy through Informal Sector Activities. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 136–142. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8906>
- Cornish, H., Walls, H., Ndirangu, R., Ogbureke, N., Bah, O. M., Tom-Kargbo, J. F., Dimoh, M., & Ranganathan, M. (2019). Women's economic empowerment and health related decision-making in rural Sierra Leone. *Culture, Health and Sexuality*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13691058.2019.1683229>
- Geleta, E. B., Elabor-Idemudia, P., Henry, C., & Reggassa, N. (2017). The challenges of empowering women: The experience of pulse innovation project in southern Ethiopia. *Sage Open*, 7(4). <https://doi.org/10.1177/2158244017736802>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Keeni, M., Takashino, N., Nongkynrih, A. K., & Fuyuki, K. (2018). Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India.

- Journal of Asian Rural Studies*, 2(2), 144.
<https://doi.org/10.20956/jars.v2i2.1417>
- Khatri., D. R. (2016). the Role of Education Towards Women Empowerment in India. *International Journal of Advanced Research*, 4(11), 550–555.
<https://doi.org/10.21474/ijar01/2117>
- Kusuma, M. W., & Badrudin, R. (2016). Fiscal decentralization effect on economic growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(2), 136–147.
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol8.iss2.art6>
- Mandal, K. C. (2013). Concept and Types of Women Empowerment. *International Forum of Teaching and Studies*, 9(2), 17–30.
<http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). the Impact of Fiscal Decentralization: a Survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129.
<https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Pandey, J. (2016). Structural & Psychological Empowerment in Rural India. *Indian Journal of Industrial Relations*, 51(4), 579.
- Patil, D. A., Dhere, A. M., & Pawar, C. B. (2009). ICT and Empowerment of Rural and Deprived Women in Asia. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, 19(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1177/1018529120090101>
- Santosa, I. (2014). *Strategic Management of Rural Community Empowerment: Based Local Resources*. *Icpm*, 194–199.
<https://doi.org/10.2991/icpm-14.2014.34>
- Shabnam, N. (2014). Natural Disasters and Economic Growth: A Review. *International Journal of Disaster Risk Science*, 5(2), 157–163. <https://doi.org/10.1007/s13753-014-0022-5>
- Sonbait, L. Y., & Wambrau, Y. L. D. (2011). Permasalahan dan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Biogas Sebagai Energi Alternatif di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *Jurnal Ilmu Ternak*, 11(2), 87–91.
- Suartha, I. D. G., Wedastra, M. S., Bagus, I., & Artika, E. (2014). *Model Empowerment of Rural Poor Farmer Women through Agribusiness Base Entrepreneurship Development in the Regency of West Lombok*. *October*, 2–5.
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Library Trends*, 55(1), 22–45.
<https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>
- Zulfida, I., & Fauzi, A. (2017). *A Performance Analysis of National Programme for Community Empowerment in Rural Indonesia*. 141–153.